

# Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan: Studi Kasus TN Tanjung Puting, Kalimantan Tengah

**Yun Pratiwi, Meitolo Hulu**

## Afiliasi

Universitas Pelita harapan

## Korespondensi

Meitolo Hulu, Fakultas Hospitality dan Pariwisata, Universitas Pelita Harapan.

Email:meitolo.hulu@uph.edu

## Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dari perspektif pemangku kepentingan, yaitu masyarakat lokal, Dinas TNTP, pengusaha industri pariwisata, Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk konservasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (studi kasus), penelitian ini mengeksplorasi aspek pengelolaan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dan bentuk kolaborasi dalam pengembangan ekowisata di TNTP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TNTP telah menjadi tujuan wisata berbasis ekowisata, namun dalam prakteknya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Potensi Orang utan dan jalur eksplorasi TNTP menemui sejumlah persoalan. Dampak lingkungan dan konflik kepentingan terhadap kegiatan di kawasan dan di luar kawasan TNTP memerlukan solusi yang kolaboratif. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dan implementasi regulasi menjadi penting dalam pengelolaan TNTP yang berbasis ekowisata. Sehingga, setiap pemangku kepentingan yang terlibat lebih mengutamakan aspek keberlanjutan di atas kepentingan ekonomi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema-tema dominan, memvisualisasikan relasi antar aktor, serta mengkategorikan narasi secara sistematis. Penggunaan NVivo juga membantu dalam analisis kode dan pembuatan model tematik.

**Kata kunci:** Pariwisata Berkelanjutan, Ekowisata, Taman Nasional Tanjung Puting, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Partisipasi Masyarakat Lokal.

## Informasi artikel:

Submisi: 2-6-2025 | Revisi: 8-7-2025 | Diterima: 11-7-2025



Copyright © 2024 by the author(s). This article is published by Universitas Gadjah Mada, Indonesia under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate, and create derivative works of this article (for both commercial and noncommercial purposes), subject to full attribution to the original publication and author(s). The full terms of this license may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

## Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma penting dalam pengembangan industri pariwisata global, termasuk di Indonesia. Menurut UNWTO, konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut Fennell, ekowisata merupakan bagian integral dari pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) karena menekankan pada aspek konservasi lingkungan, edukasi, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Fennell juga menjelaskan bahwa ekowisata adalah bentuk pariwisata yang secara langsung berkontribusi pada keberlanjutan ekologi.

Taman Nasional Tanjung Puting adalah salah satu destinasi Ekowisata (Hastari et al, 2019) dengan hasil keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022, luas Taman Nasional Tanjung Puting sekitar 389.368 hektar yang mencakupi Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat. Terdapat tiga lokasi utama untuk kegiatan wisata bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke TNTP yaitu Tanjung Harapan, Pondok Tangguy dan Camp Leahey. Dengan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan budaya yang dimilikinya, merupakan destinasi wisata yang ideal untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Keberadaan orang utan (*Pongo pygmaeus*) sebagai spesies ikonik dan daya tarik utama menjadikan TNTP memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi ekowisata (Puti Minang Anjarani et al., 2022).

TNTP selalu digambarkan sebagai contoh ekowisata di Indonesia (Soshkin & Uppink, 2022) Namun, penerapan ekowisata di TNTP tidak terlepas dari berbagai tantangan dari segi konservasi sumber daya alam, partisipasi masyarakat lokal, Pendidikan dan kesadaran lingkungan dan praktik wisata berkelanjutan (Fennell, 2020). Terdapat permasalahan seperti degradasi lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, konflik kepentingan antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dapat menghambat upaya pengembangan pariwisata yang (OECD Tourism Trends and Policies, 2022). Dengan aktivitas yang tidak terkendali di TNTP seperti penggunaan Kelotok (Kapal Wisata) yang tidak ramah lingkungan dan pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, konflik antar pemangku kepentingan sering kali muncul. Masyarakat lokal cenderung mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek dari pariwisata, sementara pengelola TNTP lebih fokus pada konservasi jangka panjang. Di sisi lain, mayoritas operator pariwisata seringkali mencari keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan (March & Wilkinson, 2009; Xavier et al., 2004).

Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya kesadaran wisatawan akan pariwisata berkelanjutan serta permintaan akan destinasi yang ramah lingkungan, dengan banyak wisatawan yang ingin mengurangi jejak karbon saat berwisata (Soshkin & Uppink, 2022). Selain itu, pengembangan produk ekowisata dan dukungan kebijakan pemerintah juga menjadi peluang bagi TNTP untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dari *Commission on Environment*.

Penelitian ini bertujuan menggali lebih peran kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan TNTP untuk pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam membangun model tata

Kelola kelembagaan yang efektif untuk mendukung keberlanjutan ekowisata. Memahami perspektif para pemangku kepentingan menjadi krusial dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan di TNTP (Amriansyah & Bhayu Rhama, 2021; Habiba & Jatmika, 2025; Hulu Meitolo, 2021). Para pemangku kepentingan, seperti peran masyarakat lokal, pengelola taman nasional, pengusaha pariwisata, dan wisatawan, memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda-beda terhadap pengembangan pariwisata di kawasan ini. Masyarakat lokal mungkin memprioritaskan manfaat ekonomi dari pariwisata, sementara pengelola taman nasional fokus pada konservasi alam. Perbedaan ini dapat memicu konflik dan menghambat implementasi pariwisata (Hall, 2022). Pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek strategis. Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam kajian ini meliputi kondisi aktual pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting, tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan—yang mencakup masyarakat lokal, pengelola taman nasional, pelaku industri pariwisata, serta lembaga konservasi—dalam proses pengelolaan tersebut, serta perumusan model pengelolaan yang berkelanjutan guna menjamin kelestarian ekosistem sekaligus mendukung manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi menekankan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal secara adil dan berkelanjutan (Gupta et al., 2024). Secara sosial, kegiatan pariwisata harus menghormati nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat serta meningkatkan kualitas hidup. Sementara itu, dari sisi lingkungan, pariwisata harus mampu meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ketiga aspek ini perlu diintegrasikan secara harmonis dalam setiap tahap pengelolaan destinasi wisata.

Partisipasi masyarakat lokal merupakan elemen krusial dalam mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta adanya akses dan kontrol terhadap sumber daya (Hastari et al., 2019.). Keterlibatan ini mencerminkan bentuk demokrasi partisipatif yang tidak hanya meningkatkan dukungan terhadap pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasilnya. Dalam konteks pariwisata, masyarakat dapat terlibat melalui penyediaan jasa, pelestarian budaya dan lingkungan, serta peran aktif dalam perencanaan dan pemantauan. Tingkat partisipasi yang tinggi berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan destinasi dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang.

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting dalam pengelolaan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Taman Nasional Tanjung Puting, keberhasilan pengelolaan memerlukan kolaborasi yang sinergis antara komunitas lokal, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata. Proses kolaboratif ini dibangun melalui prinsip kepercayaan, kepemilikan bersama atas proses, serta keterbukaan terhadap manfaat bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi seperti negosiasi, yang berfokus pada kepentingan bersama untuk mencapai solusi saling menguntungkan (Fisher & Ury, 1981), serta mediasi, yang melibatkan pihak ketiga netral untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif.

Strategi lain yang relevan adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Model kolaboratif seperti yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, dan kesepahaman bersama dalam tata kelola pariwisata. Selain itu, edukasi dan komunikasi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberlanjutan. Pendekatan pendidikan berbasis keberlanjutan yang dikembangkan oleh (Ismail, 2024; Saleem et al., 2023) membantu pemangku kepentingan memahami dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi. Kombinasi dari strategi-strategi ini dapat memperkuat pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting secara inklusif dan berkelanjutan.

Meski telah banyak studi terkait ekowisata di kawasan konservasi, riset yang secara spesifik mengkaji model kolaborasi pemangku kepentingan dalam tata kelola ekowisata berkelanjutan di TNTP melalui pendekatan Focus Group Discussion (FGD) masih sangat terbatas. Tidak banyak studi yang memaparkan praktik kolaborasi secara aktual antara masyarakat lokal, lembaga konservasi, dinas pemerintah, dan pelaku industri wisata di TNTP. Selain itu, sedikit literatur yang membandingkan pendekatan pengelolaan di TNTP dengan praktik serupa di taman nasional lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun model kolaborasi kelembagaan yang adaptif dan berbasis konteks lokal TNTP.

## Metode

Desain penelitian mengenai tantangan dan peluang dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan studi kasus, bertujuan untuk menggali perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait dengan isu pariwisata berkelanjutan. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dan kehidupan nyata, serta menggali makna yang dibangun oleh para aktor. Studi kasus juga memungkinkan penggunaan berbagai sumber data untuk menangkap kompleksitas situasi yang sedang diteliti (Yin, 1996). Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memahami dinamika antara keberlanjutan ekosistem dan pengembangan pariwisata di TNTP, dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek melalui wawancara, observasi, serta *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan memberikan gambaran yang kaya akan pengalaman dan pandangan yang relevan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha (Rijal Fadli, 2021). Penelitian yang dilakukan bahwa pengelolaan kawasan ekowisata seperti TNTP membutuhkan sinergi yang erat antara upaya konservasi dan pengembangan pariwisata yang menguntungkan masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan akan memberikan informasi yang lebih valid mengenai pemahaman dan penerimaan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang diterapkan (Yin, 1996).

Taman Nasional Tanjung Puting dikenal sebagai salah satu ekowisata terkemuka di Indonesia, yang menyajikan pengalaman berwisata berbasis alam dengan kekayaan

biodiversitas yang luar biasa, termasuk spesies langka seperti orang utan. Namun, meskipun TNTP memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal infrastruktur, pemasaran, dan pemeliharaan ekosistem (Krueger, 2015). Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Ritchie & Lewis menyebutkan bahwa meskipun potensi pariwisata alam di Indonesia sangat besar, pengelolaan yang kurang optimal dan penyebaran informasi yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi wisatawan.

Penelitian ini melibatkan tujuh informan kunci yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan TNTP, baik dari sektor masyarakat, pemerintah, maupun industri. Proses identifikasi informan juga menggunakan metode snowball untuk mendapatkan representasi aktor yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema-tema dominan, memvisualisasikan relasi antar aktor, serta mengkategorikan narasi secara sistematis. Penggunaan NVivo juga membantu dalam analisis kode dan pembuatan model tematik.

Pengumpulan data sekunder dari literatur, dokumen, dan laporan penelitian akan melengkapi pemahaman tentang bagaimana kebijakan pengelolaan kawasan ekowisata telah diterapkan, serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan di TNTP (Bowen, 2009). Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lesmana Tera & Sulandjari Kuswarini, ditemukan bahwa meskipun kebijakan konservasi dan pelibatan komunitas lokal telah berjalan dengan baik, tantangan terkait dengan infrastruktur yang terbatas dan ketergantungan pada pasar wisatawan internasional tetap menjadi isu besar.

Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di lapangan, baik dalam hal tantangan yang dihadapi maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan implementasi pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Sebagai tambahan, data yang dikumpulkan melalui observasi dan FGD akan memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai persepsi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan ekosistem dan pengembangan sektor pariwisata di daerah ini.

**Tabel 1. Guideline Interview**

Interview Guideline	
<b>Masyarakat lokal</b>	
1	Bagaimana Masyarakat terlibat di dalam kegiatan TNTP?
2	Apakah ada kolaborasi bersama Balai TNTP dengan Masyarakat lokal?
<b>Balai TNTP</b>	
3	Bagaimana kondisi pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting saat ini?
4	Bagaimana strategi pengelolaan yang diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan pariwisata?
<b>Dinas Pariwisata</b>	
5	Apa peran dinas pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Taman Nasional Tanjung Puting?
6	Bagaimana dinas pariwisata bekerja sama dengan stakeholder lain, seperti balai taman nasional dan masyarakat lokal?

<b>Lembaga Konservasi (OFI)</b>	
7	Bagaimana keterlibatan lembaga konservasi dalam perencanaan dan pengelolaan taman nasional?
8	Seberapa besar dampak aktivitas pariwisata terhadap flora dan fauna di taman nasional?
<b>Pelaku usaha Industri Pariwisata</b>	
9	Bagaimana peran industri pariwisata dalam mendukung keberlanjutan Taman Nasional Tanjung Puting?
10	Apa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di kawasan taman nasional?
11	Apa kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata dalam mendukung konservasi taman nasional?

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

## Hasil dan Pembahasan

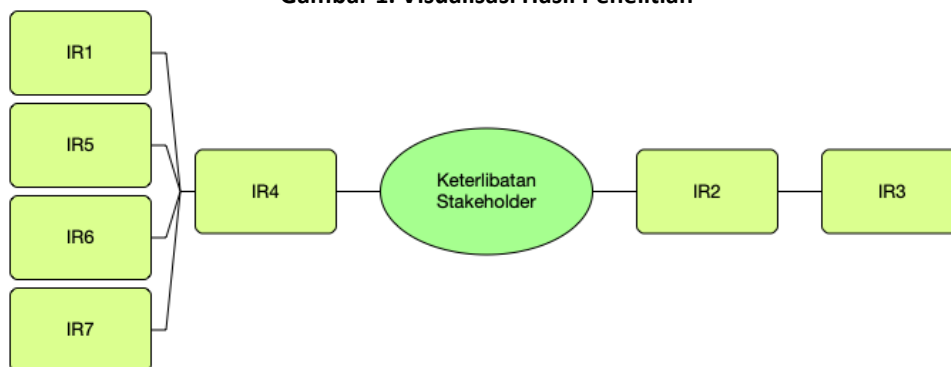
**Tabel 2. Hasil Penelitian**

No.	Informan	Aspek	Informasi
1	IR1, IR5, IR6, IR7	Keterlibatan Masyarakat lokal di dalam usaha Industri pariwisata di TNTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan Masyarakat terhadap Balai TNTP IR1</li> <li>• Peran Masyarakat di TNTP sebagai usaha Pariwisata IR5, IR6, IR7.</li> <li>• Kegiatan Masyarakat untuk melestarikan TNTP IR1, IR5, IR6, IR7</li> <li>• Tantangan dalam usaha Pariwisata di TNTP IR1, IR5, IR6, IR7</li> <li>• Pariwisata sebagai mata pencaharian utama IR1, IR5, IR6, IR7</li> </ul>
2	IR2, IR3, IR4	Peran pemerintah dan Lembaga konservasi untuk kelestarian TNTP dalam konservasi dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas-tugas yang dilakukan di area kawasan TNTP IR2, IR3, IR4</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan wilayah konservasi IR2</li> <li>• Konservasi orang utan dan satwa liar IR2, IR3</li> <li>• Dukungan teknis dan pendampingan komunitas IR4</li> <li>• Pariwisata berbasis konservasi (Ekowisata) IR2, IR3, IR4</li> <li>• Kebijakan-kebijakan area TNTP IR2</li> </ul>

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

## Hasil

**Gambar 1. Visualisasi Hasil Penelitian**



Sumber: Diolah Peneliti dari NVIVO, 2025

Visualisasi yang dihasilkan melalui perangkat lunak NVivo 12 ini dikembangkan setelah seluruh transkrip wawancara dan FGD dikoding ke dalam beberapa node tematik utama, seperti "keterlibatan masyarakat", "dukungan lembaga pemerintah", "tantangan kolaborasi", dan "praktik konservasi". Diagram yang ditampilkan merepresentasikan peta hubungan antar pemangku kepentingan berdasarkan frekuensi kemunculan dan kedekatan tematik antar kutipan dari informan. Proses ini dilakukan setelah tahap coding selesai, diikuti oleh analisis hubungan dan visualisasi sociogram untuk memetakan peran dan posisi relatif masing-masing aktor dalam ekosistem pengelolaan TNTP. Diagram ini membantu memetakan aktor kunci, alur informasi, dan potensi gap kolaborasi yang menjadi dasar dalam merumuskan model tata kelola ekowisata berkelanjutan.

Visual diagram juga menggambarkan hubungan dan peran berbagai Lembaga pemerintah dan organisasi dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan TNTP. IR2 berperan sebagai leading sector yang mengelola Kawasan tersebut, dimana seluruh kebijakan dan pendapatan yang dihasilkan disalurkan kepada pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas konservasinya, Balai TNTP menjalin kolaborasi konservasi Bersama IR3, yang turut mendukung upaya pelestarian lingkungan dan satwa di Kawasan TNTP.

Sementara itu, IR4 memiliki hubungan erat dengan sektor industri pariwisata, seperti IR1, IR5, IR6, IR7 serta terlibat dalam pengembangan SDM di sektor ini. Namun, dinas ini tidak memiliki kewenangan langsung dalam Kawasan TNTP, sehingga tidak memperoleh pendapatan daerah dari aktivitas di Kawasan tersebut.

## **Pembahasan**

Untuk memperkuat relevansi hasil, pembahasan disusun secara tematis berdasarkan temuan utama dari FGD dan wawancara. Tema-tema tersebut meliputi: (1) keterlibatan masyarakat lokal; (2) peran lembaga pemerintah dan konservasi; serta (3) tantangan kolaborasi dan implementasi kebijakan.

Pertama, keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata TNTP yang masih bersifat informal mengindikasikan pentingnya penciptaan mekanisme kolaboratif yang inklusif. Hal ini memperkuat argumentasi Ansell & Gash (2008) mengenai collaborative governance, di mana kolaborasi lintas sektor akan efektif jika didukung oleh kepercayaan, saling ketergantungan, dan komunikasi terbuka. Dalam konteks TNTP, kolaborasi belum berjalan optimal karena belum adanya kerangka kerja bersama yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kedua, dominasi Balai TNTP dalam penentuan kebijakan kawasan menunjukkan adanya asymmetric power relation, sebagaimana diuraikan dalam studi Ferreira & Valdati (2023), yang menyoroti ketimpangan peran antara aktor negara dan non-negara dalam tata kelola kawasan konservasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat lokal perlu diformalkan, tidak hanya dalam bentuk pelibatan tenaga kerja, tetapi juga dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan.

Ketiga, model pentahelix yang dimodifikasi dalam studi ini menunjukkan relevansi tinggi untuk konteks TNTP. Peran pelaku usaha wisata, LSM konservasi, dan komunitas lokal menjadi sentral dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan pendekatan ekowisata berbasis masyarakat seperti yang diangkat oleh Fennell (2020) dan diperkuat dalam studi mutakhir oleh Chock et al. (2025), yang menekankan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui mekanisme tata kelola yang partisipatif dan terintegrasi.

Dengan mengaitkan hasil dengan teori dan referensi empiris, pembahasan ini memberikan gambaran kritis tentang bagaimana praktik kolaborasi di TNTP dapat ditingkatkan menuju model tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### **A. Keterlibatan Masyarakat lokal di dalam usaha Industri pariwisata di TNTP**

*"Saya berharap orang Balai nya lebih sama warga lokal, atau mungkin sama pastinya mitra-mitra yang sudah lama sekali bekerja di Taman Nasional Tanjung Puting sebagai pendukung Taman Nasional Tanjung Puting pastinya. Dan pendukung utama malahan, karena kayak semua stakeholder yang bekerja di Taman Nasional Tanjung Puting ini, tidak cuma sebagai orang yang cari uang di situ, di lahan mereka, tapi juga orang yang juga bakalan jaga Taman Nasionalnya juga, dan pastinya lebih banyak mempromosikan Taman Nasional Tanjung Puting"* IR1.

*"Masyarakat biasanya menjadi tour guide, ranger, pengusaha kelotok dan masak. Jika untuk keterlibatan langsung dengan Balai ataupun pemerintah, saya rasa masih belum"* IR5.

*"Pekerjaan menjadi usaha Pariwisata di TNTP seperti tempat nasi kami dan pekerjaan utama"* IR6.

*"Kita biasa nya gotong royong untuk membersihkan tanaman/Gulma yang menghalangi jalan kelotok di area Sungai Sekonyer. Dan kita juga berdonasi"* IR7.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata di TNTP cukup beragam, namun masih terdapat tantangan dalam hal keterlibatan secara formal dengan pihak pengelola, seperti Balai TNTP. Sebagian besar masyarakat terlibat sebagai pemandu wisata (tour guide), ranger, pengusaha kelotok (perahu wisata), juru masak, serta pengelola rumah makan. IR5 menyatakan, "Masyarakat biasanya menjadi tour guide, ranger, pengusaha kelotok dan masak. Jika untuk keterlibatan langsung dengan Balai ataupun pemerintah, saya rasa masih belum," yang menggambarkan adanya partisipasi informal namun belum optimal dalam pengambilan keputusan dan manajemen kawasan secara langsung.

Selain itu, wawancara dengan IR1 mengungkap harapan agar hubungan antara Balai TNTP dan masyarakat lokal dapat lebih erat, mengingat peran masyarakat sebagai mitra utama dalam mendukung konservasi dan promosi TNTP. "Saya berharap orang Balai-nya lebih sama warga lokal... karena semua stakeholder yang bekerja di TNTP ini, tidak cuma cari uang di situ, tapi juga orang yang juga bakalan jaga Taman Nasionalnya juga," tegas IR1. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga mendukung aspek konservasi dan keberlanjutan kawasan.

IR6 menegaskan bahwa keterlibatan dalam usaha pariwisata bukan hanya pekerjaan sampingan, melainkan menjadi mata pencaharian utama, "Pekerjaan menjadi usaha Pariwisata di TNTP seperti tempat nasi kami dan pekerjaan utama." Hal ini menunjukkan bahwa industri pariwisata telah menjadi sektor penting dalam struktur ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, semangat gotong royong dan kontribusi terhadap lingkungan juga tercermin dalam pernyataan IR7: "Kita biasanya gotong royong untuk membersihkan tanaman/gulma yang menghalangi jalan kelotok di area Sungai Sekonyer. Dan kita juga berdonasi."



Secara keseluruhan, masyarakat lokal tidak hanya memainkan peran penting dalam operasional pariwisata, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Meski demikian, perlunya peningkatan kolaborasi dan pengakuan resmi dari lembaga pengelola kawasan terhadap peran masyarakat lokal masih menjadi tantangan yang perlu ditindaklanjuti.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) menunjukkan dinamika yang cukup beragam, mencerminkan peran aktif sekaligus tantangan yang dihadapi dalam hubungan dengan pihak pengelola kawasan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat terlibat secara langsung dalam berbagai lini usaha pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata (*tour guide*), ranger, pengusaha kelotok, juru masak, hingga pengelola rumah makan. Peran ini tidak sekadar bersifat tambahan, melainkan telah menjadi sumber mata pencaharian utama sebagaimana ditegaskan oleh informan IR6. Keterlibatan ini membuktikan bahwa masyarakat telah menjadi bagian penting dari ekosistem pariwisata di TNTP, yang menopang keberlanjutan aktivitas wisata secara operasional.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat ini masih bersifat informal, karena keterhubungan mereka dengan pihak Balai TNTP atau pemerintah belum terjalin secara struktural atau formal. IR5 mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat terlibat aktif di lapangan, keterlibatan langsung dengan lembaga pengelola masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam aspek kolaboratif dan pengambilan keputusan yang idealnya melibatkan masyarakat sebagai mitra sejajar. Harapan untuk mempererat kerja sama dengan pihak Balai pun disuarakan oleh IR1, yang melihat masyarakat bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai penjaga kawasan konservasi. Kesadaran ini menandai adanya kemauan dari masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian TNTP.

Lebih jauh lagi, semangat gotong royong dan kontribusi sosial masyarakat tercermin dalam pernyataan IR7, yang menggambarkan keterlibatan warga dalam membersihkan jalur perahu di sungai dan memberikan sumbangan sukarela. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis dan rasa memiliki terhadap kawasan taman nasional. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat peran masyarakat melalui pengakuan formal dan membangun sistem kolaborasi yang lebih inklusif dengan pihak pengelola TNTP. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberlanjutan pariwisata dan konservasi dapat dicapai melalui kemitraan yang setara dan berkelanjutan.

#### **B. Peran pemerintah dan Lembaga konservasi untuk kelestarian TNTP dalam konservasi dan Pariwisata**

*“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting, Balai TNTP melaksanakan tugas antara lain: pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan; pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional, dll bertugas untuk menjaga kelestarian konservasi” IR2.*

*“Tugas Dinas Pariwisata kan adalah memfasilitasi, mengkolaborasikan dan melaksanakan teknis-teknis tertentu sesuai dengan topoksi yang diberikan kepada Dinas Pariwisata. Tapi berkaitan dengan Tanjung Puting, peran kami di sana itu hampir kecil sekali. Karena kita pahami bahwa Taman Nasional Tanjung Puting itu kan merupakan*

*kawasan yang kewenangannya ada di pemerintah pusat, yang dikelola secara nasional oleh pusat” IR3.*

*“Jadi kalau kita kembali ke ekosistem Taman nasional Tanjung Puting Kita harus menjamin tetap keberadaan, kelestarian dan keunggulan terhadap orang utan yang ada di sana Karena itu yang jadi ikon, kalau dikayakan dengan wisata, itu yang dilihat orang untuk tujuannya” IR5.*

Pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) menunjukkan upaya serius dalam menyeimbangkan antara konservasi lingkungan dan pengembangan pariwisata. Berdasarkan data dari (*Statistik Balai Taman Nasional Tanjung Puting*, 2023), pengelolaan kawasan dibagi ke dalam tiga seksi pengelolaan dan sebelas resort utama, termasuk Tanjung Harapan, Pondok Tanggui, dan Camp Leakey. Hal ini menunjukkan struktur tata kelola yang sistematis dan berbasis zonasi. Dalam wawancara dengan Kepala Balai TNTP (2025), dijelaskan bahwa pengembangan ekowisata di kawasan ini dilakukan secara hati-hati agar manfaat ekonomi tidak merusak keanekaragaman hayati, sejalan dengan pendapat (Chock et al., 2025) yang menekankan pentingnya pengelolaan objek wisata berbasis konservasi. Kemudian, Keterlibatan masyarakat lokal melalui pelatihan, pengelolaan akomodasi ramah lingkungan, dan jasa pemanduan menjadi bagian dari pendekatan ini, sekaligus memperkuat kesadaran pelestarian.

Dengan demikian, peran pemerintah dan lembaga konservasi di TNTP tidak hanya terfokus pada aspek perlindungan kawasan, tetapi juga mencakup strategi kolaboratif yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara harmonis. Keberhasilan pengelolaan TNTP di masa depan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, partisipasi masyarakat lokal, serta komitmen bersama untuk menjaga keutuhan kawasan sebagai warisan ekologi dan tujuan wisata berkelanjutan.

Model pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting mengadopsi prinsip kolaboratif dan adaptif, yang selaras dengan rekomendasi WHO dan UNWTO tentang tata kelola kawasan konservasi yang berkelanjutan. Prinsip konservasi sebagai prioritas utama sangat ditekankan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap spesies endemik seperti orang utan, sebagaimana diuraikan oleh (Wich et al., 2012) yang menekankan perlunya kebijakan penggunaan lahan yang mempertimbangkan keberlangsungan populasi orang utan di Sumatra dan Kalimantan. Di samping itu, pendekatan adaptif dalam pengelolaan lanskap yang telah dimodifikasi oleh manusia juga direkomendasikan melalui kerja sama multipihak (Ancrenaz et al., 2020).

Inklusivitas partisipatif melalui forum multi-pihak menjadi komponen penting dalam proses pengambilan keputusan. (Ferreira & Valdati, 2023) menegaskan bahwa partisipasi lokal dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kesadaran konservasi. Transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, juga menjadi bagian integral dari model pengelolaan ini.

Pendekatan tersebut konsisten dengan model kolaborasi berbasis tata kelola seperti dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada keterbukaan dialog, pembangunan kepercayaan, serta komitmen

bersama antar pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam dokumen *Regional Action Plan for the Conservation of Orang utans in Southeast Asia 2016–2025* (Mittermeier et al., 2021), yang menyerukan pendekatan lintas sektor dalam upaya konservasi spesies yang terancam punah.

Struktur kolaborasi dalam model ini juga mengadopsi pendekatan pentahelix, yang dimodifikasi untuk konteks TNTP dengan melibatkan Balai TNTP, Dinas Pariwisata, pelaku usaha, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal. Hal ini mendukung pandangan (Ferreira & Valdati, 2023) bahwa pendidikan dan komunikasi lintas sektor penting untuk membangun kesadaran keberlanjutan dan sikap saling menghormati antar aktor. Strategi implementasi seperti pembentukan Forum Kolaborasi Ekowisata, penyusunan rencana kerja lima tahunan, pelatihan terpadu, serta sistem monitoring berbasis digital merupakan langkah taktis yang mencerminkan praktik pengelolaan modern dan responsif terhadap tantangan lapangan. Dengan model ini, TNTP tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan ekonomi hijau berbasis ekowisata yang inklusif. Temuan menunjukkan bahwa struktur kolaborasi di TNTP masih menghadapi tantangan akibat dominasi sektor pemerintah pusat dan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan studi di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Lore Lindu yang juga menghadapi ketimpangan peran antar aktor dalam pengelolaan (Amir & Pramudya, 2020). Di Asia Tenggara, pendekatan kolaboratif di kawasan konservasi seperti di Sabah (Malaysia) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif mampu memperkuat keberlanjutan ekowisata. Ini menjadi pembelajaran penting bagi TNTP agar memperkuat forum multi-aktor yang setara dan responsif terhadap kondisi lokal.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa sektor untuk mendukung kegiatan pariwisata, tetapi belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan pada sejumlah faktor. Salah satu yang dikemukakan pemerintah daerah dan pengelola taman nasional Tanjung Puting adalah anggaran. Namun, hal ini dapat diatasi melalui kolaborasi dari pemangku kepentingan yang ada di kawasan TNTP. Keberadaan sektor swasta, lembaga konservasi juga telah mengambil bagian dan berkontribusi dalam pelestarian TNTP. Kawasan TNTP sebagai kawasan konservasi sudah saatnya dikembangkan dan dikelola berbasis ekowisata. Model pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting bermanfaat untuk jangka Panjang baik bagi manusia maupun alam itu sendiri.

Model pengelolaan berbasis ekowisata sangat diperlukan, dan memastikan bahwa peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi indikator penting yang harus diwujudkan secara nyata. Implementasi regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa aspek ketersediaan SDM, perencanaan yang tepat serta pengelolaan yang tepat adalah tolok ukur bagi keberlanjutan TNTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa konservasi menjadi fokus utama, sehingga setiap kegiatan di TNTP dapat berkontribusi bagi keberlanjutan TNTP.

## Daftar Pustaka

Amriansyah, & Bhayu Rhama. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata Di Taman Nasional Tanjung Puting. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.37304/jispar.v8i1.610>

- Ancrenaz, M., Oram, F., Nardiyono, Silmi, M., Jopony, M. E. M., Voigt, M., Seaman, D. J. I., Sherman, J., Lackman, I., Traeholt, C., Wich, S., Struebig, M. J., Santika, T., & Meijaard, E. (2020). The importance of orang utans in small fragments for maintaining metapopulation dynamics. *BioRxiv*, 2(May). <https://doi.org/10.1101/2020.05.17.100842>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chock, R. Y., Bessa, E., Arteaga-Torres, J. D., Baker, L., Buchholz, R., Clucas, B., Nuñez, C., Pinho, G. M., Schulte, B. A., Blumstein, D. T., Kithaka, B., Allison, A. G., Arevalo, J. E., Hamilton, D. A., Montezano-Moreno, C. M., Nute, L. H., Rodríguez-Fonseca, J., Sandoval, L., Stamn, J., ... Seymoure, B. M. (2025). Balancing ecotourism and wildlife management through a conservation behavior approach. *Conservation Science and Practice*, December 2024, 1–11. <https://doi.org/10.1111/csp2.1330>
- Commission on Environment, W. (n.d.). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Towards Sustainable Development 2. Part II. Common Challenges Population and Human Resources 4.
- Fennell, D. A. (2020). Ecotourism. *taylorfrancis.com*. <https://doi.org/10.4324/9780429346293>
- Ferreira, D. R., & Valdati, J. (2023). Geoparks and Sustainable Development: Systematic Review. *Geoheritage*, 15(1). <https://doi.org/10.1007/s12371-022-00775-9>
- Fisher, R., & Ury, W. (n.d.). Getting to YES Negotiating an agreement without giving in.
- Gupta, R., Mondal, M. E. A., Janardhan, Kumawat, H., & Shekhar, C. (2024). Sustainable Tourism Development: Balancing Economic Growth And Environmental Conservation. *SSRN Electronic Journal*, March. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4901174>
- Habiba, I. A., & Jatmika, S. (2025). The dynamic sustainable tourism at Tanjung Puting National Park, Central Borneo, Indonesia: International actors and conservation issue. *Multidisciplinary Reviews*, 8(8). <https://doi.org/10.31893/multirev.2025200>
- Hall, C. M. (2022). Sustainable Tourism Beyond BAU (Brundtland as Usual): Shifting From Paradoxical to Relational Thinking? *Frontiers in Sustainable Tourism*, 1. <https://doi.org/10.3389/frsut.2022.927946>
- Hastari, B., Raja, S., & Girsang, M. (n.d.). Partisipasi Pelaku Ekowisata Dalam Upaya Konservasi Di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah. In *Jurnal Daun*. 6(2).
- Hulu Meitolo. (2021). Partisipasi Kolaboratif Pengembangan Kawasan Wisata Berkelanjutan. *Valemba*.
- Ismail, I. R. (2024). Enhancing Environmental Communication through Education : Strategies for Promoting Sustainability (Issue ICoETS). *Atlantis Press SARL*. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-331-3>
- Krueger, R. A. (2015). *Focus Groups A Practical Guide for Applied Research* 5th Edition.
- Lesmana Tera, & Sulandjari Kuswarini. (2023). Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pelestarian Lingkungan: Tinjauan atas Proyek Kolaboratif, Keberlanjutan, dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Multidisiplin West Science* 2(9):808-818. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.668>
- March, R., & Wilkinson, I. (2009). Conceptual tools for evaluating tourism partnerships. *Tourism Management*, 30(3), 455–462. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.09.001>
- Mittermeier, R. A., Rylands, A. B., Schwitzer, C., Jerusalinsky, L., Reuter, K., Outlaw, E., Lucena, J., Nash, S. D., Konstant, W. R., Byler, D., Wich, S., Williamson, L., Abwe, E., Supriatna, J., Kormos, R., Cheyne, S. M., Waters, S., Friis Hansen, M., Cortés-Ortiz, L., ... Chetry, D. (2021). IUCN SSC Primate Specialist Group. January, 407–408.
- OECD Tourism Trends and Policies 2022. (2022). OECD. <https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en>
- Puti Minang Anjarani, Marini Yunita, & Grace Caroline Mailoa. (2022). Literature Analysis on the Bornean Orang Utan (*Pongo Pygmaeus*) Conservation Ecotourism in Tanjung Puting National Park, Waringin Barat City, Central Kalimantan. *International Journal of Travel, Hospitality and Events*, 1(3), 248–265. <https://doi.org/10.56743/ijothe.v1i3.175>

- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Ritchie, Jane., & Lewis, Jane. (2014). Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers. Sage Publications.
- Saleem, A., Aslam, S., Sang, G., Dare, P. S., & Zhang, T. (2023). Education for sustainable development and sustainability consciousness: evidence from Malaysian universities. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 24(1), 193–211. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2021-0198>
- Soshkin, M., & Uppink, L. (2022). Travel & Tourism Development Index.
- Statistik Balai Taman Nasional Tanjung Puting. (2023).
- Wich, S. A., Gaveau, D., Abram, N., Ancrenaz, M., Baccini, A., Brend, S., Curran, L., Delgado, R. A., Erman, A., Fredriksson, G. M., Goossens, B., Husson, S. J., Lackman, I., Marshall, A. J., Naomi, A., Molidena, E., Nardiyono, Nurcahyo, A., Odom, K., ... Meijaard, E. (2012). Understanding the Impacts of Land-Use Policies on a Threatened Species: Is There a Future for the Bornean Orang-utan? *PLoS ONE*, 7(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0049142>
- Xavier, F., Richard, T., Karen, S., & Marianna, K. (2004). Sustainable Supply Chain Management in Tourism. *Business Strategy and the Environment*, 271(July 2006), 260–271. <https://doi.org/10.1002/bse.527>
- Yin, R. K. (1996). Case Study Research: Design and Methods.